

## Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta

Endang Sari

Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin  
Email : [Alridh13@gmail.com](mailto:Alridh13@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini, membahas kebangkitan politik identitas Islam pada arena pemilihan gubernur Jakarta. Perspektif konstruktivisme yang digunakan oleh peneliti adalah pandangan Pierre Van Den Bergh (1991) yang berpendapat bahwa politik identitas baik etnik maupun agama sengaja dikonstruksi oleh elit politik untuk mendapatkan kuasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah Fenomenologi dengan memakai pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebangkitan politik identitas Islam terjadi melalui upaya pembangunan citra diri dan menegakkan harga diri sebagai Muslim yang terhina sehingga sesama Muslim harus memilih mereka yang seagama dan seiman. Kondisi ini dihadirkan untuk membangun psikologis sebagai mayoritas yang terluka sekaligus ruang untuk membangun batas kuasa mayoritas kepada mereka yang dipandang minoritas demi mempertahankan demarkasi kekuasaan dan kepentingan elit politik dengan mengatasnamakan agama

**Kata Kunci:** Politik, Identitas, Islam, Pilkada, Jakarta.

### Abstract

This paper, discussed the rise of Islamic identity politics in the Jakarta governor's election arena. The constructivism perspective used by the researcher is Pierre Van Den Bergh (1991) who argues that ethnic and religious identity politics are deliberately constructed by the political elite to gain power. The type of research used is Phenomenology by using qualitative approach. The results show that the rise of Islamic identity politics takes place through the efforts of building self-image and upholding self-esteem as a humiliated Muslim so that fellow Muslims must choose those who are inhabitants and faithful. This condition is presented to build psychologically as the wounded majority as well as the space to build the limit of majority power to those who are considered minority in order to maintain the demarcation of power and the interests of the political elite in the name of religion

**Keywords:** Politics, Identity, Islam, Pilkada, Jakarta.

## I. PENDAHULUAN

Politik identitas khususnya agama memang tidak pernah mati dalam arena politik di negeri ini. Momentum pemilihan Gubernur Jakarta yang baru saja usai, adalah contoh nyata bagi pembenaran argumentasi tersebut. Ketika Identitas Agama, muncul menjadi sebuah kekuatan politik.

Momentum pilkada Jakarta juga telah mempertontonkan sejumlah isu kampanye yang menyita energi bangsa

bukan cuma publik Jakarta tapi juga masyarakat Indonesia, antara lain kasus Surah Al Maidah ayat 51 yang berujung pada mobilisasi massa dari berbagai daerah di tanah air untuk datang berunjuk rasa di Jakarta, sampai beredarnya opini publik 'Saya Muslim, saya pilih pemimpin Muslim'.

Penonjolan orang Muslim harus memilih pemimpin Muslim ini bahkan menjadi sebuah tema panjang yang menjadi pembicaraan publik, sepanjang

pemilihan gubernur Jakarta yang disuarakan pada mimbar Jumat sampai pada berbagai momen acara keagamaan.

Banyak kalangan kemudian menarik kesimpulan, bahwa Indonesia sedang mengalami potensi konflik baru yakni antara negara dan agama, utamanya jika berkaca pada tingginya tensi politik pada pemilihan gubernur Jakarta yang baru saja selesai.

Relasi kuasa politik identitas agama dan negara di Indonesia sebenarnya bukanlah tema yang baru. Sejarah telah mencatat ketegangan ini sudah mulai terasa pada empat babakan era kenegaraan kita. Mulai dari masa sebelum kemerdekaan, orde baru dan pasca reformasi yang ditunjukkan hadirnya gerakan yang berbasis Islam dan upaya penegakan politik aliran sebagai hukum formal negara.

Pertama, perdebatan mengenai relasi agama dan negara yang terjadi saat ini merupakan imbas dari polemik yang pernah diperdebatkan Muhammad Natsir dan Soekarno di awal kemerdekaan. Pada saat itu keduanya berdebat tentang negara Republik Turki tahun 1923, Serta kemunculan, Mustafa Kemal Atatürk yang dipuja Soekarno sebagai lambang dari modernisasi Islam, karena berhasil memisahkan antara agama dan negara yang bagi Natsir adalah sebuah kesalahan. Setelah itu keduanya kembali berdebat lewat tulisan di majalah Panji Islam pada tahun 1940.

Soekarno dianggap mewakili golongan nasionalis sekuler dan Natsir dianggap mewakili golongan nasionalis Islami. Golongan nasionalis sekuler diyakini mewakili pandangan bahwa agama mesti dipisahkan dari agama karena ajaran-ajaran agama tidak bisa menyelesaikan masalah negara yang rumit. Golongan ini meyakini bahwa

agama hanya dibutuhkan untuk urusan ritual dan bukan pada kebijakan. Sementara kalangan nasionalis Islami meyakini bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan karena urusan-urusan agama sangat terkait dengan persoalan negara. Kalangan ini percaya bahwa agama tidak hanya mengurus hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi juga hubungan manusia dan manusia dalam sebuah struktur politik bernama negara.

Sampai akhirnya, perdebatan tersebut berlanjut pada sidang tim 9 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Soebarjo, AA Maramis, Abdul Kahar Muzakir, KHA Wahid Hasyim, Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Haji Agus Salim, tentang perlu atau tidaknya Islam dijadikan dasar negara. Sejarah kemudian mencatat bahwa Perdebatan tersebut yang menghadirkan ‘Piagam Jakarta’ di tanggal 22 Juni 1945 telah menjadi inspirasi bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi dengan menghapus butir pertama yang memuat kewajiban pelaksanaan syariat bagi pemeluknya setelah melalui perdebatan yang sangat alot.

Kedua, ketegangan dan konflik antara negara dan agama dengan kehadiran Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949 yang diprakarsai oleh teman indekos Soekarno, Kartosuwiryo. NII juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI yang berarti Rumah Islam. Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya ditegaskan bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”, dalam undang-undangnya dinyatakan pula bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan

“Hukum yang tertinggi adalah Al Qur’an dan Hadist”. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa kewajiban negara untuk memproduksi undang-undang yang berlandaskan syari’at Islam dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Al-Qur’an dan Hadits Sahih yang mereka sebut dengan “hukum kafir”, sesuai dalam Al-Qur’an Surah Al Maidah, ayat 145. Lalu dilanjutkan oleh Daud Beureueh dan Kahar Muzakar yang berujung pada berbagai peristiwa pemberontakan dan catatan kelam negara ini.

Ketiga, momentum pasca orde baru tahun 1998 ditandai dengan bermunculannya partai-partai Islam yaitu PPP, PBB, Partai Keadilan, Partai Persatuan, Masyumi, Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Abud Yatama (PAY), PSII-1905, PNU dan Partai Cinta Damai (PCD), PKB, PAN, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI). Meskipun partai-partai Islam ini tidak meraih suara terbesar, namun koalisi mereka melalui kaukus Poros Tengah dapat menghalangi tampilnya aliran dan kelompok Politikus nasionalis dan koalisinya serta memunculkan beberapa tokoh utama pada posisi-posisi strategis di lembaga eksekutif dan legislatif. Seperti Amin Rais sebagai ketua DPR-RI dan Gus Dur sebagai Presiden.

Era reformasi juga merupakan era keterbukaan yang memungkinkan orang untuk mengekspresikan pikiran termasuk cara keberagaamaan. Ditandai dengan lahirnya sejumlah ormas islam yang berupaya melakukan penegakan syariah dan gerakan nahi munkar seperti FPI yang dalam berbagai catatan penelitian disebutkan sangat terinspirasi oleh gerakan-gerakan Timur Tengah seperti Jabhat al-Tahrir al-Falastini di Palestina, Palestini Libration Front (PLF) di Palestina, Moro National Libratiaon Front

(MNLF) di Philipina kemudian MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), munculnya transformasi gerakan politik kepartaian dari kelompok tarbiyah Partai Keadilan yang terinspirasi oleh gerakan iikhwanul muslimin dan Hizbut Tahrir atau Liberation Party (Partai Pembebasan) yang didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani, serta Forum Komunikasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan Laskar Jihadnya, dan lain-lain. Masing-masing organisasi Islam ini lahir dengan karakternya masing-masing. Yang menarik, gerakan organisasi ini mampu menyedot perhatian media massa dengan seluas-luasnya di media dalam dan luar negeri.

Selain sangat kental dengan simbol, gerakannya yang lebih mengandalkan unjuk kekuatan dalam melawan sesuatu di mana hal ini tidak dijumpai sebelumnya banyak orang dirugikan atas pembenaran tindakannya yang mengatasnamakan agama dengan kata lain jihad. Fenomena munculnya gerakan baru Islam ini juga didukung oleh menguatnya wacana penerapan syariat Islam yang dibarengi oleh kebijakan pemerintah dengan otonomi daerah masa presiden Abdurrahman Wahid. Pemerintah memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Sejak inilah Islam Indonesia banyak dikenal lebih pada gerakannya, beberapa gerakan yang anarki dengan mengatasnamakan amar ma’ruf lebih sering didengar masyarakat daripada kegiatan-kegiatan ilmiah dan kajian-kajian untuk mengeksplorasi Islam.

Selain itu jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup membawa harapan munculnya pemerintahan pasca orde baru yang demokratis. Hal itu tercermin dari kebebasan mendirikan partai politik. Tercatat ada 48 partai baru yang

mengikuti pemilu 1999. Termasuk di dalamnya partai Islam. Tercatat sejumlah partai politik Islam yang saat ini (atau pernah) berada pada peringkat 10 besar partai politik di Indonesia memiliki sejarah kelahiran pada kurun waktu 1998-1999. Beberapa contoh diantaranya adalah PBB, PPP, PKS, PAN, dan PKB.

Secara umum, parta-partai politik Islam pasca reformasi memiliki dua aliran berbeda yang saling bertentangan. Aliran yang pertama menganut bahwa syariah Islam harus diterapkan dalam sistem pemerintahan. Partai-partai besar yang menganut aliran ini adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan aliran kedua menolak pengimplementasian syariah Islam dalam sistem pemerintahan. Aliran ini dianut oleh dua partai Islam yang cukup besar yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

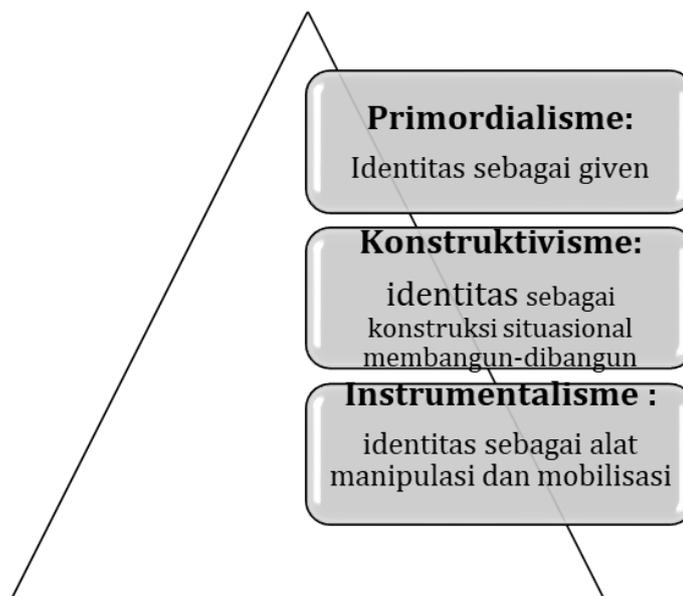
Pada babakan ke-empat, momentum pilkada Jakarta yang dikhawatirkan sebahagian kalangan, menjadi simbolisasi dari kebangkitan politik identitas agama dan ketegangan antara gerakan Islam Indonesia dan negara yang pada akhirnya memenangkan pilkada Jakarta.

## II. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini berfokus pada usaha untuk mengkaji fenomena di balik kebangkitan politik identitas agama yang muncul pada arena pilkada Jakarta.

## III. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beragam sudut pandang yang melihat fenomena politik identitas. Pierre Van Den Bergh (1991) maupun Ubed Abdilah (2002) menjelaskan tiga perspektif teoritis dalam mengkaji politik identitas yaitu: primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme.



**Gambar.** Pembagian paradigma melihat Politik Identitas

Sumber; Pierre Van Den Bergh *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*. New Delhi: Sage Publication; 1991

Pedekatan pertama, argumentasi primordialisme yang melihat fenomena agama dalam kategori sosio-biologis. Pandangan ini berpandangan bahwa kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang 'given' dan tidak bisa dibantah.

Secara konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas. Secara definitif, para penganut paham primordialisme menekankan pada upaya pencapaian kepentingan kolektif dan kemampuan identitas kolektif untuk mendefinisikan dan mengartikulasi pandangan umum masa lalu dan saat ini. Sekaligus juga membentuk visi untuk masa depan.

Pendekatan primordial mengemukakan bahwa kepentingan individual anggota agama dibuat untuk menunjang kepentingan kelompok dan pimpinannya untuk memperkuat basis agama sebagai sumber kekuatan sosial.

Namun, pendapat ini tidak bisa dipertahankan secara metodologis karena membatasi ruang tafsir dan penerangan akan perubahan dari fenomena sosial yang terjadi secara waktu ke waktu. Seperti yang dilakukan oleh Max Weber yang menjelaskan etnisitas sebagai kumpulan orang yang menghibur kepercayaan subjektif dalam nyanyian mereka karena kesamaan-kesamaan fisik, agama, atau karena kenangan koloni dan migrasi .

Pendekatan kedua adalah konstruktifis yang dikembangkan oleh Frederik Barth . Teori ini memandang identitas agama dan budaya, sebagai hasil dari proses yang kompleks, manakala batas-batas simbolik terus dibangun dan membangun, oleh manfaat mitologi yang

berlangsung melalui bahasa maupun pengalaman masa lampau.

Frederik Barth (1988) lebih jauh berargumentasi bahwa agama dan etnisitas mengalami perubahan terus-menerus dan bahwa batas keanggotaan suatu kelompok etnik sering dinegosiasikan dan dinegosiasikan kembali. Tergantung pada perjuangan politik di antara kelompok-kelompok yang ada.

Frederik Barth menyebut fenomena negosiasi identitas ini sebagai situasional. Pada batas ini, para aktor berupaya mengeksploitasi simbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan pribadi atau sosial.

Hal ini dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra diri (self image) dan harga diri (self esteem) baik sebagai individu maupun kelompok. Identitas-identitas inilah yang akan selalu dialami, dikomunikasikan, diolah, ataupun dikonstruksi setiap individu dalam berinteraksi.

Meskipun pada dasarnya seseorang memiliki banyak sisi dalam hal pengungkapan identitasnya, namun menurut Barth identitas ke-etnikan dan agama seseorang selalu menjadi hal utama untuk membangun kategori pembeda.

Di antara sekian banyak identitas seseorang yang akan ditampilkan, sesungguhnya identitas etnik dan agama akan selalu mendapat ruang atau tempat dalam diri seseorang. Konsep identitas situasional menjelaskan bahwa setiap individu akan melakukan proses komunikasi, melalui pertukaran simbol, pembentukan makna, dan setting bertujuan dalam keseharian mereka sesuai

situasi, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai.

Demikian pula budaya yang dominan atau budaya pribumi yang biasa mempengaruhi budaya minoritas atau budaya pendatang. Selanjutnya budaya minoritas terpengaruh oleh budaya yang dominan akibat dari tekanan-tekanan lingkungan budaya itu sendiri.

Barth (1988:10) kemudian menjelaskan dua pandangan soal ini: Pertama, batas-batas budaya dapat bertahan walaupun suku-suku tersebut saling berbaur. Dengan kata lain adanya perbedaan etnik dan agama tidak ditentukan oleh terjadinya pembauran, kontak dan pertukaran informasi, namun lebih disebabkan oleh adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan.

Pandangan Barth ini melihat bahwa perbedaan kategori tetap dipertahankan walaupun terjadi pertukaran peran serta keanggotaan di antara unit-unit etnik dan agama dalam perjalanan hidup seseorang. Semuanya dijadikan relasi penting untuk mempertahankan kekuasaan etnik.

Kedua, dapat ditemukan hubungan sosial yang kuat, bertahan lama, dan penting di antara dua kelompok etnik dan agama yang berbeda. Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya status etnik dan agama yang berbeda tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial.

Tetapi menurut Barth, status sosial etnik dan agama terbentuk oleh sistem sosial tertentu. Setiap etnik dan agama dapat berkembang dan bertahan serta mempunyai nilai-nilai budaya dan moral sehingga menjadi ciri khas identitas itu sendiri dalam berinteraksi.

Demikian halnya setiap identitas ditandai dengan sistem komunikasi dan pola interaksi. Ciri kelompok etnik dan agama tersebut dapat diterima dan dapat dibedakan dengan kelompok lain yang berlangsung secara sosial dalam interaksi mereka.

Pendekatan konstruktivisme Barth, meyakini pembentukan batas-batas dan ciri khas tersebut ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang kemudian membentuk polanya sendiri. Adanya perbedaan etnik dan agama dalam masyarakat lebih disebabkan oleh proses mempertahankan status etnik dan agama di dalam masyarakat multicultural.

Dalam konteks hubungan tersebut, Frederik Barth meyakini bahwa kelompok minoritas menjadi subordinat kelompok mayoritas yang mendominasi sosialitas hubungan ini. Pada kondisi ini, yang minoritas inilah yang menjadi etnik dan agama, menjadi unik, atau bahkan terasing dan aneh.

Sementara pandangan ketiga, dalam kacamata teoretis, kalangan instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik. Menurut pandangan ini, manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras dan bahasa, maka pada saat tersebut, kelompok itu sedang melakukan mobilisasi kepentingan mereka.

Kalangan Intrumentalisme menjelaskan bahwa identitas etnik dan agama senantiasa dijadikan sebagai sarana elit etnik dan agama memanipulasi identitas tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Pandangan ini mengasumsikan bahwa mereka yang minoritas akan cenderung dijadikan sebagai alat untuk menguntungkan kelompok mayoritas.

David Brown (1989) menjelaskan dalam *Ethnic Revival: Perspectives on State and Society*, sebagai berikut:

“Ketakutan dan intimidasi seringkali terjadi dalam kondisi di mana kekerasan etnis/agama terjadi, tidak dapat digunakan untuk menjelaskan analisis identitas dalam situasi kompetisi tanpa kekerasan, seperti pemilihan umum”.

Pandangan David Brown tersebut sejalan dengan pendapat Donal Horowitz yang memberikan penjelasan etnisitas (agama) memang dapat dimanipulasi (instrumentalisme), namun juga secara luas etnisitas dalam hal ini agama diterima secara bawaan (primordial).

Dalam berbagai sisi, pendekatan instrumentalis banyak mendapatkan kritik karena dianggap terlalu materialis dan tidak memperhitungkan hubungan positif keterkaitan primordial dari seseorang terhadap etnis/agamanya.

Namun, berbagai bukti empiris bahwa identitas primordial seringkali digunakan sebagai instrumen politik adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena hal ini terjadi dalam berbagai arena dan situasi politik.

Berangkat dari hal tersebut, sudut pandang peneliti melihat bahwa politik identitas agama adalah proses konstruksi seperti pandangan Frederick Barth. Barth memandang bahwa identitas agama sebagai hasil dari proses yang kompleks manakala batas-batas simbolik terus dibangun dan membangun oleh manfaat mitologi suatu hitungan sejarah untuk kepentingan situasional para elit politik.

Pada tahap selanjutnya, konstruksi identitas agama ini kemudian digunakan sebagai proses instrumentalisme. Tujuannya adalah sebagai alat untuk manipulasi dan mobilisasi sosial demi mengukuhkan atribut-atribut agama

sebagai alat kekuasaan seperti penjelasan yang dikemukakan oleh David Brown maupun pendapat Donal Horowitz.

#### IV. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Fenomenologi. Secara ringkas pendekatan fenomenologi bertujuan memperoleh interpretasi terhadap pemahaman manusia (subyek) atas fenomena yang tampak dan makna dibalik yang tampak, yang mencul dalam kesadaran manusia (subyek).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat kontekstual yang berusaha menekankan pada pemaknaan suatu fenomena interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

Penelitian ini berlokasi di Kota Jakarta, dengan mengambil data dari berbagai sumber baik kepastakaan, media massa dan kutipan dari sejumlah narasumber.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis telah membuat sebuah gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi/interpretasi, komparasi dan sejenis itu. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang). Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pesulap kawakan Limbad yang identik dengan 'aksi diam', akhirnya angkat bicara terkait dukungan di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017. Pria berambut panjang itu, menyatakan dukungannya kepada Anies-Sandi, 'Karena saya seorang muslim. Otomatis saya akan dukung (Anies-Sandi).

Limbab tidak sendiri, mengungkapkan alasan akhirnya memilih Anies- Sandi. Hasil kajian tempo.co yang diambil dari berbagai survei menunjukkan hal yang sama, dimana faktor kesamaan agama menjadi alasan utama memilih pasangan Anies- Sandi.

Lembaga Survei Indometrik menyampaikan kesimpulan sebesar 60 % pemilih menjadikan faktor agama sebagai alasan dalam memilih gubernur. Tidak jauh berbeda dengan laporan Survei Indometrik, ulasan Tempo tersebut juga menguraikan kesimpulan Survei Polmark Indonesia yang dipimpin oleh Eep Saifulah Fatah yang memberikan penjelasan bahwa sebesar 67,7 % pemilih Jakarta menyetujui memilih pemimpin Muslim.

Besarnya peran alasan agama dibalik kemenangan Anies-Sandi, mengingatkan kita pada thesis lama Clifford Geertz (1960) dan Afan Gaffar (1992), memberi ilustrasi adanya keterkaitan antara aliran dan perilaku politik seseorang.

Menariknya, mengapa Jakarta yang dinilai sebagai lambang rasionalitas publik juga tidak berdaya menghadapi gaya berpikir politik aliran tersebut? Berangkat pada pandangan Barth, bahwa identitas dianggap penting sebab sangat

terkait dengan citra diri (self image) dan harga diri (self esteem) baik sebagai individu maupun kelompok.

Meskipun pada dasarnya seseorang memiliki banyak sisi dalam hal pengungkapan identitasnya, namun menurut Barth identitas ke-etnikan dan agama seseorang selalu menjadi hal utama untuk membangun kategori pembeda.

1. "Saya Muslim Saya Memilih Anies-Sandi" sebagai Citra Diri dan Harga Diri

Di antara sekian banyak identitas seseorang yang akan ditampilkan, sesungguhnya identitas etnik dan agama akan selalu mendapat ruang atau tempat dalam diri seseorang. Konsep identitas situasional menjelaskan bahwa setiap individu akan melakukan proses komunikasi politik, melalui pertukaran simbol, pembentukan makna, dan setting bertujuan dalam keseharian mereka sesuai situasi, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai.

Demikian pula identitas budaya yang dominan atau budaya pribumi yang biasa mempengaruhi budaya minoritas atau budaya pendatang, serta mayoritas dan minoritas. Selanjutnya kelompok minoritas terpengaruh oleh budaya yang dominan akibat dari tekanan-tekanan lingkungan sendiri.

Jika menelaah pilkada Jakarta, sentimen atas citra diri dan harga diri kelompok inilah yang terbangun mengapa politik identitas agama menjadi begitu berpengaruh pada arena pemilihan gubernur Jakarta. Sentimen yang terbangun dari dua hal. Pertama, citra diri (self image) yang merasa terhina oleh ucapan Ahok dikepulauan seribu yang berujung aksi 411 dan 212.

Sentimen citra diri sebagai muslim yang terluka inilah yang dimunculkan dan dijadikan sebagai sarana untuk menyerang

ahok. Apalagi, kasus penistaan agama tersebut mendapatkan legitimasi dari lembaga ke-agamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Demikian pula pada akhirnya, ketika kasus Ahok dibawa ke lembaga peradilan yang mendakwa Ahok sebagai tersangka penista agama. Dua kondisi inilah yang kemudian membentuk citra diri dan identitas sebagai sesama muslim menguat.

Perasaan solidaritas sebagai sesama muslim dibangun dan membangun dalam bingkai propaganda identitas yang sama. Sesuatu yang menyulut kesadaran kolektif untuk memperjuangkan korps kebersamaan sebagai sesama muslim yang harus bersatu menjadi menguat.

Kedua, harga diri (self esteem) yang membentuk solidaritas kelompok akibat tajamnya polarisasi pilkada Jakarta dalam dua pilihan muslim atau non muslim. Dua kondisi ini menjadi alasan utama mengapa slogan 'Saya Muslim, Saya Memilih Anies-Sandi' menjadi mengemuka.

Sesuatu yang berhasil dibangun oleh kelompok penekan yang menolak Ahok sejak awal. Dengan menggunakan pandangan konstruktivis yang dikemukakan oleh Fredric Barth kita bisa melihat bahwa hal ini merupakan bagian dari konstruksi elit politik yang digunakan sebagai senjata untuk melawan mereka yang berbeda.

Harga diri sebagai muslim yang terluka telah dibangkitkan apalagi dengan posisi Basuki Tjahaya Purnama yang terjebak oleh kasus penistaan agama yang mendorong kebangkitan harga diri muslim menjadi meluas dan melintasi batas daerah dan wilayah.

Solidaritas atas nama kebersamaan sebagai sesama muslim yang terlecehkan

ini berhasil dikapitalisasi dalam jumlah dukungan aksi demonstrasi, sesuatu yang menjadi alasan utama yang menjadikan issue agama semakin menguat.

## 2. Garis Kuasa Mayoritas atas Minoritas berwajah Tirani Spiritualisme

Howertz mengasumsikan bahwa mereka yang minoritas akan cenderung dijadikan sebagai alat menguntungkan kelompok mayoritas dan kategori tersebut disusun berdasarkan kepentingan kategorik para elit politik. Kemunculan sejumlah wacana politik 'Jakarta harus dipimpin oleh Gubernur mayoritas'.

Dalam penjelasan Muhtar Haboddin, menyangkut relasi dibalik munculnya politik identitas, bahwa politik identitas sengaja dibangun oleh para elit lokal untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka dalam arena politik lokal, sekaligus wujud dari powersharing kekuasaan yang dibangun berdasarkan latar belakang identitas.

Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan bagi "orang asli" yang menghendaki kekuasaan dan bagi mereka "orang pendatang" harus melepaskan kekuasaan. Konstruksi batas mayoritas dan minoritas ini dibangun secara tajam dalam polarisasi pilkada DKI.

Ilmuwan politik Rousseau melakukan pembacaan yang tajam, bahwa terbentuknya korps politik ini, dibangun dengan semangat integrasi yang dibawa ke dalam suatu komunitas politik yang terorganisir dengan menggunakan prosedur demokrasi.

Pemanfaatan demokrasi sebagai sarana mempertegas batas segregasi antara mayoritas dan minoritas inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok politik yang

menolak Ahok. Hal yang juga disadari oleh Rousseau bahwa akses keadilan yang dijangkau oleh minoritas semakin sulit.

Jika kita lihat pada Pilkada Jakarta, kelas minoritas terpaksa menjadi objek ideologi dari mayoritas. Sebutlah kelompok Front Pembela Islam (FPI), subjek dominasi yang berdiri paling depan untuk memaksa agar minoritas Kristen Jakarta tunduk pada kehendak mayoritas. Dengan dasar bahwa definisi mayoritas merujuk pada statistik agama.

Situasi ini dapat kita pahami sebagai upaya dari kuasa mayoritas untuk menghegemoni struktur, pikiran dan perilaku politik masyarakat. Ruang publik bahkan terdeterminasi oleh sistem simbolik dan doktrin agama yang berusaha membangun propaganda berbasis solidaritas mayoritas.

Sementara kita tentu sadar bahwa Jakarta merupakan kota dengan penduduk yang beragam sehingga model strategi ideologi yang memakai power agama tertentu bisa diterjemahkan sebagai sebuah tindakan pelegitimasi kekerasan atau pemaksaan.

Pertengkarannya mayoritas dan minoritas ini memang tidak dapat kita lepaskan dari permainan kepentingan politik. Spirit religius yang coba

dibungkuskan ke pelbagai dimensi kehidupan politik tak lain sekadar sebuah upaya akumulasi kepentingan jika menggunakan pandangan konstruktivisme.

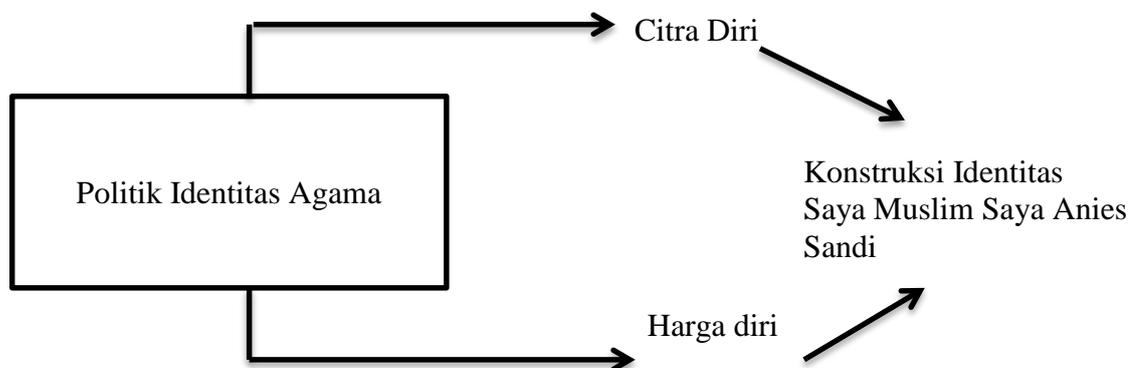
Kelompok-kelompok yang menjadikan semangat agama sebagai garis demarkasi dalam aktivitas politik sebenarnya telah terjebak pada bentuk tirani spiritualisme dengan cara mengubah spiritualisme sebagai sebuah komoditas di dalam politik.

Muaranya masih sama yakni power oriented, bukan mengejar politik berkemanusiaan di dalam negara ini. Elit agama Indonesia di dalam politik, meminjam logika Michel Foucault, sekedar melakukan reproduksi kekuasaan. Sesungguhnya yang terjadi pada pilkada Jakarta adalah agama sedang menjaga eksistensi kekuasaannya demi mempertahankan dominasi mayoritas atas minoritas.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Kesimpulan peneliti atas wujud kuasa agama dalam dalam pilkada Jakarta dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme Barth dapat dijelaskan dalam model berikut :



Kebangkitan politik identitas Islam digunakan dengan melalui upaya pembangunan citra diri sebagai sesama Muslim harus memilih mereka yang seagama dan seiman. Upaya ini dijalankan melalui berbagai konvensi gubernur Muslim untuk Jakarta dan Saya Muslim harus memilih Anies-Sandi pada putaran kedua.

Representasi ayat Al-Qur'an, fatwa ulama digunakan sebagai cara mengalang dukungan pemilih untuk memilih gubernur Muslim, hal ini merupakan upaya membangun solidaritas identitas bersama sebagai sesama Muslim yang harus bersatu.

Kedua, perasaan harga diri sebagai muslim yang terhina oleh kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok menjadi senjata politik yang terus direplikasi untuk menghadapi Ahok yang dipandang sebagai penista agama. Kondisi ini dipertahankan untuk membangun psikologis sebagai mayoritas yang terluka sekaligus sebagai jalan membangun batas kuasa kepada mereka yang dipandang sebagai minoritas untuk mempertahankan demarkasi kekuasaan dan kepentingan elit politik

Fenomena kebangkitan politik identitas agama di pemilihan gubernur Jakarta berlangsung dengan dua tahap :

Penonjolan citra diri sebagai sesama muslim yang dibangun lewat solidaritas "Saya Muslim Saya Memilih Anies-Sandi".

Menampilkan harga diri sebagai muslim yang selama ini terzalimi oleh penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok/Basuki Tjahya purnama dengan dalih membenaran fatwa MUI dan dakwaan hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian.

## 2. Saran

Penggunaan politik identitas agama dalam arena demokrasi pilkada langsung hanya bisa dihadapi dengan membangun semangat asimilasi identitas yang lebih besar yakni pembangunan sprit identitas yang lebih luas, seperti semangat kebinekaan dan persatuan sebagai negara bangsa.

Setiap calon harus menghindari persinggungan identitas dalam arena pilkada sebagai jalan menghindari kebangkitan dan sentimen identitas yang terjadi di Indonesia. Hal ini harus dilakukan dalam upaya pembangunan demokrasi yang esensial di Indonesia dan menghindari terjadinya perpecahan sesama anak bangsa dan menghindari hadirnya kekuasaan politik identitas agama dalam arena politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ubed S . 2002. Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas. Magelang, Indonesiatara
- Barth, Fredick . 1988. Kelompok Etnis dan Batasanya. Terjemahan Oleh Nining. LS. Jakarta : UI Press
- Best, Steven dan Kellner, Douglas. . 2003. Teori Postmodern, Interogasi Kritis. Terj. Indah Rohmani. Malang: Boyan Publishing,.
- Cornell, S. & Hartmann, D. 1998. Ethnicity and Race: Making Identities in a Changing World. California: Pine Forge Press
- Eriksen TH (1993) Ethnicity and Nationalism (anthropological perspective). London: Pluto Press.
- Faisal, Sanapiyah . 1990. Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi,

YA 3, Malang

Foucault, Michel. . 1995. *Dicipline and Punish : The Birth of Prison*. New York : Vintage,.

Foucault, M. 2007. *Seks dan Kekuasaan*. Terj. S. H. Rahayu. Jakarta: Gramedia

———.2000. *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, Terj. B. Priambodo dan Pradana Boy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.

Foucault, . 1978. a. *Governmentality*. In *The Essential Foucault*. The New Press. New York.

Giorgio Agamben. 1995. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, Stanford University Press, California.

H. Asyari, Dkk. 2005. *Pengantar Study Islam*. IAIN Sunan Ampel Press

Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations?*, Foreign Affairs. Summer, tk,.

Horowitz J & James DL . 2006. *Democratic Survival in Multi-etnik Countries*. Working Paper. Department of Political Science, University of California, California.

INCIS . 2002. *Hubungan Antar Etnik dan Masalah Kebangsaan di Jakarta*, Laporan Penelitian INCIS Jakarta.

R. Sukma & C. Joewono (ed.). 2007. *Islamic Thought and Movements in Contemporary Indonesia*, Centre for Strategic and International Studies.

<https://majalah.tempo.co/konten/2017/04/24/LU/153011/Faktor-Agama-dan-Blunder-Sembako/09/46>

<http://seleb.fajar.co.id/2017/03/09/limbad-saya-seorang-muslim-otomatis-saya-akan-dukung-anies-sandi/>